BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2020

KABUPATEN KEPAHIANG

RABU, 08 JULI 2020

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

TGR Aset Muncul Lagi

KEPAHIANG, BE - Walaupun mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun anggaran 2019 yang didapat Kabupaten Kepahiang. Namun ada rekomendasi yang harus segera dipenuhi atau ditindak lanjuti jajaran eksekutif, diantaranya terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) aset yang harus dilaksanakan OPD terkait. Bila tidak dilaksanakan, maka bisa berdampak pada tindakan hukum dari para penegak hukum.

Agar memastikan rekomendasi BPK RI terlaksana dengan baik, DPRD Kepahiang menugaskan panitia kerja (Panja) melakukan penelusuran. Salah satu yang diminta telusuri, yakni adanya TGR bidang aset yang kembali muncul. Padahal tahun lalu BPK RI sudah merekomendasikan pelaksanaan TGR aset milik daerah tersebut.

"Kita sudah sampaikan kepada ketua Panja untuk mengundang Sekda, BKD melalui bidang aset, Inspektorat selaku pengawas internal pemerintah, Dinas PU dan Lainnya agar rekomendasi TGR misalnya aset itu kita minta penjelasan kenapa muncul lagi pada rekomendasi saat ini," ungkap Waka 1 DPRD Kepahiang, Andrian Defandra SE MSi.

Panja harus menggali penjelasan secara rinci dari jajaran OPD dan inspektorat mengani poin-poin catatan yang disampaikan BPK RI. Keterangan dari eksekutif dibutuhkan agar dewan bisa menyimpulkan poin poin secara tepat untuk direkomendasikan diakhir kerja Panja. Tentu supaya rekomendasi itu bisa dilaksanakan oleh eksekutif.

Menindak lanjuti instruksi pimpinan, Ketua Panja, Hendri AMd bersama anggota diantaranya Andrian Defandra MSi, Candra, Wansah, dan Bambang Asnadi menggelar rapat internal. Tujuannya membahas tindak Lanjut LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Kepahiang TA 2019.

Dalam rapat internal masing-masing anggota Panja dan tenaga ahli DPRD telah menyampaikan saran mengenai mekanisme pembahasan, waktu dan pokok-pokok pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

"Hari ini kita melakukan rapat internal Panja berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2010 Panja merupakan bentuk pengawasan DPRD terhadap LHP BPK RI. Kita akan undang OPD untuk memberikan rekomendasi agar ditindaklanjuti, sebagai bahan evaluasi agar apa yang menjadi temuan, ketidak patuhan dan ketidak cermatan dalam penggunaan dan penyajian laporan keuangan dapat lebih baik sesuai ketentuan peraturan perundangan. Sehingga Opini WTP atas LKPD kabupaten Kepahiang yang sudah diraih dapat dipertahankan," tutup Hendri.(**320**)